

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lembaga Pendidikan Islam

1. Pengertian Lembaga Pendidikan Islam

Lembaga disebut juga institusi atau pranata, sedangkan lembaga sosial adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola tingkah laku, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum, guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.¹

Lembaga pendidikan melaksanakan pembinaan, pendidikan dan pengajaran dengan sengaja, teratur dan terencana adalah sekolah, guru-guru yang melaksanakan melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran tersebut adalah orang-orang yang telah dibekali dengan pengetahuan tentang anak didik, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas kependidikan.²

Zarkowi Soejati memberi pengertian lebih terperinci tentang pendidikan Islam diantaranya sebagai berikut:³

- a. Pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Disini

¹Muhaimin dan Abd. Mujib. *Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Trigenda Karya,1993), hlm. 284

²Zakiah Darajat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah* (Jakarta: Ruhama,1995), hlm. 77

³Andarwati, "*Naturalitas Islamisasi Ilmu Pengetahuan di Lembaga Pendidikan Islam*", El Harakah, Edisi 57, hlm. 92

Islam berfungsi sebagai sumber, nilai yang akan direalisasikan dalam seluruh kegiatan pendidikan.

- b. Pendidikan Islam memberikan perhatian sekaligus menjadi ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Disini kata "Islam" ditempatkan sebagai bidang studi ilmu yang dikemas sedemikian rupa, dan diperlakukan sebagaimana ilmu lain.
- c. Pendidikan Islam mencakup kedua pengertian diatas. Hal ini berarti Islam ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus bidang studi atau ilmu yang dipasarkan lewat program studi yang diselenggarakan.

Pendapat diatas menyimpulkan bahwa lembaga pendidikan merupakan suatu lembaga yang berdasarkan nilai-nilai Islam, baik itu tercermin nama lembaga itu sendiri ataupun nilai-nilai yang diterapkannya dalam lingkungan lembaga serta pengajaran yang diberikan kepada peserta didik mengandung unsur-unsur Islam.

Menurut Hasbullah lembaga pendidikan Islam adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Kelembagaan pendidikan Islam merupakan subsistem dari masyarakat atau bangsa. Dalam operasionalitasnya selalu mengacu dan tanggap kepada kebutuhan perkembangan masyarakat. Tanpa bersikap demikian, lembaga pendidikan Islam dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan kultural. Kesenjangan inilah menjadi salah satu sumber konflik antara pendidikan dan masyarakat. Dari sanalah timbul krisis pendidikan yang intensitasnya berbeda-beda menurut tingkat atau taraf kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam haruslah sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat, sebab tanpa

memperhatikan hal tersebut, barangkali untuk mencapai kemajuan dalam perkembangannya agak sulit.⁴

Lembaga pendidikan Islam adalah suatu bentuk organisasi yang diadakan untuk mengembangkan lembaga-lembaga Islam, baik yang permanen maupun yang berubah-ubah, dan mempunyai pola-pola tertentu dalam memerankan fungsinya, mempunyai struktur tersendiri yang dapat mengikat individu yang berada dalam naungannya, sehingga lembaga ini mempunyai kekuatan hukum sendiri.⁵

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang penting setelah keluarga, berfungsi membantu keluarga untuk mendidik anak-anak. Anak-anak mendapat pendidikan di lembaga ini, yang tidak didapatkan dalam keluarga, atau karena kedua orang tuanya tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anaknya.⁶

Secara teoritis pendidikan Islam sangat besar peranannya dalam membentuk masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan melalui analisis sebagai berikut:⁷

- a. Dilihat dari segi tujuan pendidikan Islam memiliki tujuan yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat yang beradab.

Athiya al-Abtasy misalnya mengatakan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa da tujuan pendidikan Islam. Mencapai akhlak yang mulia

⁴ Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), Cet I, hlm. 38-39.

⁵ *Ibid.*,

⁶ Djumransjah, *Filsafat Pendidikan Islam* (Malang: Bayu Media, 2006), hlm.146

⁷ Abudin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Prenada Media, 2003), hlm. 129-132

adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan Islam tetapi ini tidak berarti bahwa kita tidak mementingkan pendidikan jasmani dan akal atau ilmu atau segi-segi praktis lainnya.

- b. Dilihat dari sifatnya, pendidikan Islam tidak memisahkan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran biasanya diartikan mengisi otak anak dengan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) sedangkan pendidikan adalah membina *attitude*, kepribadian atau sikap.
- c. Dilihat dari segi pendidik/guru, pendidikan Islam menghendaki agar seorang guru disamping memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas tentang ilmu yang akan diajarkan, juga harus mampu menyampaikan ilmunya itu secara efektif dan efisien serta memiliki akhlak yang mulia.
- d. Dilihat dari segi sasarannya, pendidikan Islam ditujukan untuk semua manusia, tanpa membeda-bendakan jenis kelaminnya, dengan cara demikian maka semua umat manusia akan memperoleh kesempatan pendidikan yang sama pula. Pendidikan Islam juga berlangsung seumur hidup.
- e. Dilihat dari segi lingkungannya, pendidikan Islam menggunakan seluruh lingkungan pendidikan, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat sampai dengan sekolah atau perguruan tinggi. Ketiga lingkungan pendidikan tersebut

memiliki tanggung jawab yang sama. Secara konsep, lembaga sosial tersebut terdiri atas tiga bagian, yaitu:⁸

- 1) Assosiasi, misalnya universitas, persatuan
- 2) Organisasi khusus, misalnya madrasah/sekolah, rumah sakit.
- 3) Pola tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan, atau pola hubungan sosial yang mempunyai tujuan tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa Lembaga pendidikan Islam merupakan hasil pemikiran yang dicetuskan oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang didasari, digerakkan, dan dikembangkan oleh sumber ajaran Islam. Lembaga pendidikan Islam secara keseluruhan bukanlah lembaga beku, akan tetapi fleksibel dan berkembang menurut kehendak waktu dan tempat, yang dalam pertumbuhan dan perkembangannya mempunyai hubungan erat dengan kehidupan Islam.

2. Tanggung Jawab Lembaga Pendidikan Islam

Menurut Siti Gazalba, yang bertanggung jawab atau berkewajiban menyelenggarakan lembaga pendidikan adalah:⁹

- a. Pendidikan rumah tangga (keluarga), yaitu pendidikan primer untuk fase bayi dan fase kanak-kanak sampai usia sekolah. Pendidiknya adalah orang tua, sanak kerabat, famili, saudara-saudara, dan teman sepermainan.

⁸Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 284-285

⁹*Ibid.*, hlm. 288

- b. Sekolah/madrasah, yaitu pendidikan sekunder yang mendidik anak mulai dari usia masuk sekolah sampai keluar dari sekolah tersebut. Pendidiknya adalah guru yang profesional.
- c. Kesatuan sosial (masyarakat), yaitu pendidikan tertier yang merupakan pendidikan yang terakhir tetapi bersifat permanen. Pendidikannya adalah kebudayaan, adat- istiadat, suasana masyarakat setempat.

Lembaga pendidikan dengan masyarakat sekitarnya terjadi hubungan yang saling memberi dan saling menerima. Lembaga pendidikan dalam merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh warga masyarakat tentang pengembangan putra-putri mereka. Sedangkan masyarakat dapat merespon dengan baik upaya yang dilakukan lembaga untuk kebaikan putra-putrinya, hampir tidak ada orang tua siswa yang mampu membina sendiri putra-putri mereka untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara total, integratif, dan optimal seperti yang dicita-citakannya. Itulah sebabnya lembaga-lembaga pendidikan mengambil alih tugas ini. Lembaga pendidikan ingin memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada masyarakat.

Secara terinci manfaat hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat sebagai berikut:¹⁰

Tabel 1

Manfaat hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat

¹⁰ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), Ed. Revisi, hlm. 188,

Bagi Lembaga Pendidikan Islam	Bagi Masyarakat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbesar dorongan untuk mawas diri 2. Memudahkan, memperbaiki pendidikan 3. Memperbesar usaha meningkatkan profesi pengajar 4. Konsep masyarakat tentang guru/dosen menjadi benar 5. Mendapat koreksi dari kelompok masyarakat 6. Mendapat dukungan moral dari masyarakat 7. Memudahkan meminta bantuan dari masyarakat 8. Memudahkan pemakaian media pendidikan masyarakat 9. Memudahkan pemanfaatan narasumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahu hal-hal persekolahan dan inovasinya 2. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan 3. Menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan 4. Melakukan usul-usul terhadap lembaga pendidikan

Seperti sudah diuraikan diatas, madrasah memanfaatkan hubungan dengan masyarakat ialah sebagian untuk mempertahankan hidupnya dan sebagian untuk melayani masyarakat. Pertahanan hidup dengan dengan pendekatan situasional dapat dilakukan dengan mawas diri meningkatkan profesi staf pengajar dan memperbaiki pendidikan pada umumnya. Hal ini mungkin dilaksanakan berkat adanya koreksi atau kontrol dari masyarakat, dukungan moral, material, media pendidikan dan narasumber di masyarakat.¹¹

Sama halnya dengan pertahanan hidup, layanan terhadap masyarakat juga akan semakin meningkat bila hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat semakin baik. Hal ini disebabkan banyak warga diperhatikan, lembaga terbuka bagi para masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pendidikan.

¹¹ *Ibid.*, hlm 189

B. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *Participation* yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan (John M. Echols dan Hasan Shadily, 1984:449). Partisipasi dapat diartikan sebagai pengambilan bagian, keikutsertaan atau peran serta.¹² Menurut Yusufhadi Miarso istilah “Partisipasi adalah keterlibatan secara spontan baik berupa pikiran, tenaga, barang ataupun uang yang disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan”.¹³ Menurut Ach. Wazir Ws., et al. partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu.¹⁴ Partisipasi adalah keterlibatan secara sukarela oleh masyarakat, dalam perubahan yang ditentukannya sendiri, membangun diri, kehidupan dan lingkungan mereka.¹⁵

Dari pengertian partisipasi dapat disimpulkan dalam tiga gagasan yaitu keterlibatan, kontribusi dan tanggung jawab. Keterlibatan adalah keikutsertaan mental dan emosional yang tidak saja menunjukkan keterlibatan fisik tetapi juga keterlibatan secara mental. Kontribusi merupakan pemberian kesempatan untuk menyalurkan inisiatif dan kreativitas untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan tanggung jawab

¹² Pius Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 572

¹³ Miarso Yusufhadi, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 706

¹⁴ Ach. Wazir Ws., et al., ed, *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. (Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID Indonesia, 1999), hlm. 29

¹⁵ Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Parsipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003) hlm. 64

merupakan keharusan seseorang untuk melaksanakan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.

2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah eksistensi yang hidup, dinamis dan selalu berkembang.¹⁶ Masyarakat merupakan perwujudan kehidupan bersama manusia karena di dalam masyarakat berlangsung proses kehidupan sosial, proses antarhubungan dan interaksi. Di dalam masyarakat sebagai lembaga suatu lembaga kehidupan manusia berlangsung pula keseluruhan proses perkembangan kehidupan.¹⁷

Masyarakat juga dapat diartikan sebagai satu bentuk tata kehidupan sosial dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. Dalam arti ini masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan, medan kehidupan manusia yang majemuk (plural, suku, agama, kegiatan kerja, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi dan sebagainya). Manusia berada dalam multikompleks antar hubungan dan antaraksi didalam masyarakat.¹⁸

Menurut driyarkara (1980:12) yang dikutip oleh Hasbullah Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan kesatuannya serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya.¹⁹

Sedangkan menurut Sihombing dan Indardjo, masyarakat adalah “produk lingkungan, lingkungan akan membentuk karakter masyarakatnya”. Masyarakat

¹⁶ Hery Noer Aly dan Munzier Suparta, *Pendidikan Islam Kini Dan Mendatang*. (Jakarta: CV. Triasco.2003) hlm.191

¹⁷ Mohammad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1996), hlm. 183

¹⁸ Cook dalam Sutari Imam Bernadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, (Yogyakarta: FIP IKIP Yogyakarta, 1986), hlm. 133

¹⁹ Hasbullah, *Loc.Cit.*, hlm 55

memiliki hak untuk memilih dan menentukan arah, tujuan, isi, proses, cara dan ukuran keberhasilan (efektivitas) penyelenggaraan pendidikan.²⁰

3. Pengertian Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Menurut Isbandi partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.²¹

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ditujukan untuk :²²

- a. Terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab bersama dalam pendidikan
- b. Terselenggaranya kerjasama yang menguntungkan antara pihak yang berkepentingan dengan pendidikan
- c. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam (lingkungan) dan sumber daya buatan seperti dana, fasilitas dan peraturan-peraturan.
- d. Meningkatkan kinerja sekolah, yang berarti pula meningkatnya produktivitas, kesempatan memperoleh pendidikan, keserasian proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kondisi anak didik dan lingkungan, serta komitmen dari para pelaksana pendidikan.

Keterlibatan masyarakat diarahkan dan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan hak dan tanggung jawab dalam dunia pendidikan. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat ini diharapkan akan dapat mensukseskan program pendidikan yang telah dicanangkan. Jadi, dengan kata lain keterlibatan masyarakat

²⁰ Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat: Konsep Dan Strategi Implementasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014) hlm.74

²¹ Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, (Depok: FISIP UI Press, 2007), hlm 27

²² Miarso Yusufhadi, *Loc. Cit.*, hlm. 709

dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah diperlukan agar madrasah dapat berfungsi dengan baik.

Berdasarkan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Dr. Siti Irene Astuti ia mengartikan partisipasi sebagai bentuk keterlibatan orang dalam suatu kegiatan dan keterlibatan yang dimaksud ini bisa berupa keterlibatan mental, emosi maupun fisik.²³ Apabila pengertian tersebut kemudian ditarik dalam konteks partisipasi terhadap pendidikan dapat dipahami bahwa partisipasi itu merupakan keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam dunia pendidikan, dalam hal ini sekolah, pembangunan, mengkritisi dan lain sebagainya yang berorientasi pada pendidikan.

Ia menjabarkan bahwa partisipasi masyarakat perlu dilihat dari aspek yang luas. Pertama adalah bahwa partisipasi itu adalah hak masyarakat sebagai warga negara yang hidup dalam sistem demokratis dan kita harus menyadari bahwa partisipasi itu merupakan hak setiap warga masyarakat. Kedua adalah dimensi partisipasi. Kata dimensi itu sendiri jika kita lihat artinya adalah ukuran (panjang, lebar, tinggi).²⁴ Jika dikaitkan dengan partisipasi maksudnya adalah ruang lingkup yang mencakup partisipasi masyarakat terhadap pendidikan antara lain bagaimana hubungan individu dengan keluarga, keluarga dengan sekolah dan masyarakat dengan pendidikan. Karena partisipasi masyarakat tidak terlepas dari beberapa elemen

²³ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm. 50-59

²⁴ M. Moeliono Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988), hlm. 292

tersebut. Tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat akan dipengaruhi oleh antar hubungan tersebut.

Sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat, bahkan sekolah tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.²⁵ Masyarakat tersebut dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat berhak melaksanakan pendidikan yang berbasis masyarakat, dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar pendidikan nasional. Dan pendidikan yang berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan sumber lainnya. Demikian juga lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di era otonomi ini merupakan wujud dari kesadaran pemilikan masyarakat akan keberadaan lembaga pendidikan yang kemudian mendorong menjadi rasa tanggung jawab untuk menciptakan sumberdaya berkualitas. Partisipasi masyarakat tersebut kemudian dilembagakan dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah.

Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan sedangkan komite sekolah adalah

²⁵Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), Cet. 2. hlm. 234.

lembaga yang terdiri dari unsur orang tua, komunitas, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dewan pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan dalam tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten yang hirarkis.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok orang secara sadar untuk berkontribusi dalam menyumbangkan dana, gagasan, membantu tenaga, memberikan kritik yang membangun, memberikan motivasi, menyumbangkan keahlian, serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendidikan.

4. Landasan Hukum Partisipasi Masyarakat

Dasar hukum bagi pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan Nasional sangatlah penting, mengingat pemerintah tidak akan sanggup menyelenggarakan pendidikan dengan baik tanpa dukungan dari masyarakat. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, diantaranya adalah:²⁶

1. Pada pasal 6 UU Sisdiknas disebutkan bahwa “setiap warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”
2. Pada pasal 8 UU Sisdiknas disebutkan bahwa “masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”.

²⁶ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, hlm. 7

3. Pada pasal 9 UU Sisdiknas disebutkan bahwa “masyarakat wajib memberi dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan”

Pada pasal 6, 8 dan 9 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan. Hak masyarakat dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan di madrasah antara lain ikut berpartisipasi dalam program pendidikan disekolah mulai dari membuat visi, misi madrasah sampai ikut menentukan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik daerah setempat.

Sedangkan kewajiban masyarakat antara lain memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah berupa ikut berpartisipasi memberikan sumber daya yang belum dimiliki oleh sekolah yaitu dapat berupa ide (pemikiran), tenaga, pemberian bantuan buku, alat pendidikan dan dana. Dengan demikian sumber pendanaan tidak hanya ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melainkan pula ditanggung oleh masyarakat.

Selain itu sesuai dengan UU Sisdiknas pasal 56 ayat [1] yang berbunyi, “masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan madrasah dan komite sekolah”.²⁷ Berdasarkan pasal ini masyarakat dapat berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan dari membuat perencanaan sampai melakukan evaluasi program kegiatan pendidikan di madrasah melalui organisasi atau wadah seperti komite madrasah dan dewan pendidikan.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 111

Jadi, masyarakat disamping mempunyai kewajiban membiayai pendidikan, mereka juga mempunyai kewajiban untuk memikirkan, memberikan masukan, dan membantu penyelenggaraan pendidikan di madrasah. kewajiban ini sangat perlu dikomunikasikan secara luas kepada masyarakat agar dapat dipahami bersama, sehingga partisipasi masyarakat dalam pendidikan menjadi semakin besar.

5. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Untuk mengikutsertakan warga masyarakat dalam pembangunan pendidikan, sudah sewajarnya para manajer pendidikan melalui tokoh-tokoh masyarakat aktif menggugah perhatian mereka. Para manajer dapat mengundang para tokoh masyarakat untuk membahas bentuk-bentuk kerjasama dalam pendidikan. Adapun bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pendidikan menurut Holil, yaitu :²⁸

1. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
2. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
3. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.

²⁸ Holil Soelaiman, *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. (Bandung, 1980), hlm. 10

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan, yaitu:²⁹

- a. Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah;
- b. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik;
- c. bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan/atau penelitian dan pengembangan; Pengadaan dan pemberian
- d. Pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional;
- e. Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis;
- f. Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
- g. Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;

²⁹ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.* (Online), (<http://www.bbhn.go.id>), diakses 24 Agustus 2015.

- h. Pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja;
- i. Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional;
- j. Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan;
- k. Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- l. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri.

Menurut Kokon Subrata (Widi Astuti, 2008:13), bentuk partisipasi terdiri dari beberapa hal yaitu:

- 1. Turut serta memberikan sumbangan finansial.
- 2. Turut serta memberikan sumbangan kekuatan fisik.
- 3. Turut serta memberikan sumbangan material.
- 4. Turut serta memberikan sumbangan moril/pikiran (saran, gagasan, ide)

Dari beberapa kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu bentuk uang/finansial, sarana/prasarana, tenaga/keahlian dan pikiran/moril. Partisipasi dalam bentuk finansial misalnya partisipasi pemberian sumbangan, pinjaman, beasiswa, dll. Partisipasi dalam bentuk sarana/prasarana misalnya bantuan buku pelajaran, pengadaan dan bantuan ruangan, gedung, tanah dan lain sebagainya. Bentuk tenaga dan keahlian misalnya partisipasi tenaga, baik tenaga kependidikan, tenaga ahli, keterampilan dalam membantu KBM, ikut serta dalam program pendidikan

memperbaiki sarana-prasarana dll. Bentuk moril misalnya partisipasi buah pikiran, pendapat/ ide, saran, pertimbangan, nasehat dukungan moril dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan atau dalam pengambilan suatu keputusan.

6. Memberdayakan Partisipasi Masyarakat

Hubungan masyarakat dalam lembaga pendidikan adalah sebuah sistem yang ada pada semua level dalam semua sistem persekolahan yang dibentuk sebagai sebuah program untuk mengembangkan dan mempertahankan derajat prestasi siswa dan untuk membangun dukungan masyarakat. Oleh karena itu, program hubungan masyarakat dalam sebuah lembaga pendidikan mempunyai tujuan utama yaitu : pertama untuk mendorong partisipasi siswa. Kedua, untuk membangun pengetahuan dan pengertian masyarakat dalam mendukung kegiatan sekolah khususnya dukungan keuangan.³⁰

Sutisna dalam E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* mengemukakan maksud hubungan sekolah dengan masyarakat:

(1) untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud dan saran-saran dari sekolah; (2) untuk menilai program sekolah; (3) untuk mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik ; (4) untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan; (5) untuk membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah; (6) untuk memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah; (7) untuk mengarah dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah.³¹

³⁰ Amin Nur, *Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Pemberdayaan Masyarakat* (Malang : UIN Fakultas Tarbiyah Jurnal el-Hikmah), Vol. III, hlm. 213

³¹ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT. RosdaKarya, 2005) hlm.

Hubungan sekolah dengan masyarakat sangat besar manfaat dan artinya bagi kepentingan pembinaan dukungan moral, material, dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Selanjutnya bagi masyarakat dapat mengetahui berbagai hal mengenai sekolah dan inovasi-inovasi yang dihasilkan, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan tekanan, dan tuntutan terhadap sekolah. Berbagai teknik dan media dapat dilakukan dalam konteks ini, seperti mengadakan rapat atau pertemuan, surat menyurat, buku penghubung, bulletin sekolah, dan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler yang bermanfaat bagi peserta didik maupun orang tua. Pada hakikatnya, sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, seperti para orang tua yang tergabung dalam Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Demikian pula hasil pendidikan yang berupa lulusan akan menjadi harapan dan dambaan masyarakat. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh menjadi menara gading bagi masyarakat.

Keterbatasan pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana, serta pembiayaan pendidikan, menyebabkan dukungan serta partisipasi masyarakat menjadi semakin penting, terutama masyarakat yang terkait langsung dengan sekolah yang bersangkutan. Pendidikan sebagai lembaga sosial akan semakin lancar dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya, serta memperoleh simpati dari masyarakat, jika dapat menjalin hubungan yang akrab dan serasi dengan segenap masyarakat dan lingkungan, melalui manajemen pengembangan hubungan sekolah dengan masyarakat.

Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi. Agar tercipta hubungan dan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat, masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan. Gambaran dan kondisi sekolah ini dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui laporan kepada orang tua murid, bulletin bulanan, penerbitan surat kabar, pameran sekolah, open house, kunjungan kesekolah, kunjungan kerumah murid, penjelasan oleh tenaga kependidikan sekolah radio dan televisi, serta laporan tahunan.

Dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah, kepala sekolah dan guru merupakan kunci keberhasilan, yang harus menaruh perhatian terhadap apa yang terjadi pada peserta didik disekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk 1) saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja; 2) saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing; 3) kerja sama yang erat antara

sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa bangga dan ikut bertanggungjawab atas suksesnya pendidikan disekolah.³²

7. Menggalang Partisipasi Orang Tua

Partisipasi orang tua merupakan keterlibatan secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi itu bisa berupa gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan pendidikan. Karakteristik orang tua, misalnya pengusaha, petani, nelayan, pedagang, pegawai, kaya, miskin akan mewarnai kondisi dan kualitas sekolah. Perbedaan karakteristik orang tua tersebut membuat harapannya terhadap sekolah terutama lulusannya berbeda pula. Oleh karena itu sekolah harus menjalin hubungan, kerjasama dengan orangtua peserta didik. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan dan kemajuan sekolah, oleh karena itu penting mengkaji dan memahami cara-cara yang dapat ditempuh untuk menggalang partisipasi orang tua terhadap kegiatan pendidikan di sekolah.

Dari berbagai sumber dapat dikemukakan bahwa peran paling penting dan efektif dari orang tua adalah menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga peserta didik dapat belajar dengan tenang dan menyenangkan. Mengingat bahwa salah satu kunci sukses menggalang partisipasi orang tua adalah menjalani hubungan yang harmonis, maka perlu diprogramkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Melibatkan orang tua secara proporsional dan professional dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah. Misalnya, dalam mengembangkan program unggulan sekolah dan life skill.

³²*Ibid.*, hlm, 165-166

b. Menjalani komunikasi secara intensif. Secara proaktif sekolah menghubungi orang tua peserta didik dengan cara sebagai berikut.

- 1) Mengucapkan selamat datang dan bergabung dengan sekolah dan dewan pendidikan serta komite sekolah, bagi orang tua peserta didik baru. Setelah itu perlu dilakukan pengenalan dan orientasi singkat agar mereka mengetahui sekolah dengan berbagai program dan aktivitasnya.
- 2) Mengadakan rapat secara rutin dengan orang tua sehingga rapat dapat efektif dan orang tua dapat saling kenal.
- 3) Mengirimkan berita tentang sekolah secara periodic, sehingga orang tua mengetahui program dan pengembangan sekolah
- 4) Membagikan daftar tenaga kependidikan secara lengkap termasuk alamat nomor telepon dan tugas pokok sehingga orang tua dapat berhubungan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
- 5) Mengundang orang tua dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan prestasi peserta didik
- 6) Mengadakan kunjungan ke rumah murid
- 7) Mengadakan pembagian tugas dan tanggung jawab antara sekolah dengan orang tua dalam pembinaan pribadi peserta didik.

8. Menggalang Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat mengacu kepada adanya keikutsertaan masyarakat secara nyata dalam suatu kegiatan dapat berupa gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan pendidikan. Dalam sistem pemerintahan yang

kebijakannya bersifat top-down, partisipasi masyarakat dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan tidak begitu dipermasalahan, namun pada sistem pemerintahan yang bottom-up, tingginya partisipasi masyarakat dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut.

Thoha (1984) menggolongkan partisipasi masyarakat ke dalam tiga kelompok, yaitu partisipasi mandiri yang merupakan usaha berperan serta yang dilakukan secara mandiri oleh pelakunya, partisipasi mobilisasi, dan partisipasi seremoni.³³ Partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari cakupannya. Partisipasi secara sempit dan partisipasi secara luas. Secara luas Partisipasi dapat diartikan sebagai demokratisasi politik. Di dalamnya masyarakat menentukan tujuan, strategi dan perwakilannya dalam pelaksanaan kebijakan dan pembangunan. Secara sempit partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses perubahan dan pengembangan masyarakat sesuai dengan arti pembangunan sendiri.

Dalam rangka desentralisasi dan demokratisasi pendidikan, partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Masyarakat harus menjadi partner sekolah dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, kerjasama keduanya sangat penting dalam membentuk pribadi peserta didik. Dalam suasana yang demikian, sekolah memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai partner masyarakat dan sebagai penghasil tenaga kerja terdidik. Sebagai partner masyarakat, sekolah akan dipengaruhi oleh corak pengalaman seseorang didalam lingkungan masyarakat, bahan bacaan, tontonan, dan kondisi sosial ekonomi. Sekolah juga harus bertanggungjawab

³³ *Ibid.* hlm. 170-171

terhadap perubahan masyarakat, yang dapat dilakukan melalui fungsi layanan bimbingan, dan forum komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Di sisi lain, kesadaran peserta didik untuk mendayagunakan masyarakat sebagai sumber belajar dipengaruhi oleh kegiatan dan pengalaman belajar yang diikutinya di sekolah.

Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan rasional, yaitu (1) adanya kesesuaian antara fungsi pendidikan yang dimainkan oleh sekolah dengan kebutuhan masyarakat; (2) ketetapan sasaran dan target pendidikan yang ditangani oleh sekolah ditentukan oleh kejelasan perumusan kontrak antara sekolah dan masyarakat; dan (3) keberhasilan penunaian fungsi sekolah sebagai layanan pesanan masyarakat sangat dipengaruhi oleh ikatan objektif antara sekolah dan masyarakat. Ikatan objektif ini dapat berupa perhatian, penghargaan, dan bantuan tertentu; seperti dana, fasilitas, dan bentuk bantuan lain, baik bersifat ekonomis maupun non ekonomis, yang memberikan makna penting pada eksistensi dan hasil pendidikan (Depdikbud, 1990: 5-19).³⁴

Hubungan dengan masyarakat akan tumbuh jika masyarakat juga merasakan manfaat dari keikutsertaannya dalam program sekolah. Manfaat dapat diartikan luas, termasuk rasa diperhatikan dan rasa puas karena dapat menyumbangkan kemampuannya bagi kepentingan sekolah. Jadi, prinsip menumbuhkan hubungan dengan masyarakat adalah dapat saling memberikan kepuasan. Salah satu jalan penting untuk membina hubungan dengan masyarakat adalah menetapkan komunikasi yang efektif.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 172

Dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat, Depdiknas (2000), mengemukakan bahwa sekolah dapat:³⁵

- a. Melaksanakan program-program kemasyarakatan misalnya kebersihan lingkungan
- b. Mengadakan open house yang memberi kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui program dan kegiatan sekolah. Tentu saja dalam kesempatan semacam itu sekolah perlu menonjolkan program-program yang menarik minat masyarakat.
- c. Mengadakan buletin sekolah, majalah atau lembar informasi yang secara berkala memuat kegiatan dan program sekolah, untuk diinformasikan kepada masyarakat.
- d. Mengundang tokoh untuk menjadi pembicara atau pembina suatu program sekolah. Misalnya mengundang dokter yang tinggal di sekitar sekolah atau orang tua murid untuk menjadi pembicara atau pembina program kesehatan sekolah.
- e. Membuat program kerja sama sekolah dengan masyarakat misalnya dalam perayaan hari nasional dan keagamaan.

Secara lebih operasional, kepala sekolah dapat menggalang partisipasi masyarakat melalui dewan sekolah, rapat bersama, konsultasi, radio dan televisi, surat dan telepon, pameran sekolah, serta ceramah.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 174-175

9. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi tidak muncul seketika tetapi ada faktor yang menyebabkan timbulnya partisipasi. Orang akan ikut berpartisipasi terhadap sesuatu disebabkan oleh adanya stimulus. Irene dalam menjelaskan ini banyak mengutip pemikiran Herbert Blumer tentang interaksionisme simbolik. Sebagaimana diketahui bahwa pokok pikiran Blummer adalah respon actor terhadap sesuatu tersebut.³⁶ Artinya jika dikaitkan dengan partisipasi pendidikan, Irene mencoba memberikan pemahaman bahwa partisipasi masyarakat terhadap pendidikan seringkali didasarkan pada penilaian dan pemaknaan pada terhadap pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu jelas sekali bahwa ia sangat menekankan pada pentingnya kesadaran seseorang dalam memaparkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.

Menurut Slamet ada 3 faktor intern yang mendukung partisipasi masyarakat yakni: adanya kemauan, adanya kemampuan dan adanya kesempatan untuk berpartisipasi.³⁷

Kemauan dan kesempatan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan dalam hal ini masyarakat. Sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan. Apabila ada kemauan tapi tidak ada kemampuan dari masyarakat walaupun telah diberikan kesempatan oleh pemerintah dan madrasah maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga jika ada kemauan dan kemampuan tapi tidak ada

³⁶ Siti Irene, *Loc. Cit.*, hlm. 56

³⁷ Slamet Santoso, *Supervisi Pengembangan Masyarakat*, (Bandung, PT Enerco, 1992) hlm

ruang atau kesepakatan oleh pemerintah maupun madrasah sebagai penyelenggara pendidikan maka tidak mungkin juga ada partisipasi.

Angell (1967) dikutip dari Ensiklopedia Wikipedia mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:³⁸

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang terhadap

³⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi>, diakses tanggal 10 Oktober 2015

lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

e. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.